

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2017. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, Rineka Cipta, Jakarta
- Dhaniswara K Harjono, 2007. *Hukum Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Faisal Al Riyadi, 2017. *Kajian yuridis putusan mahkamah konstitusi republik Indonesia nomor 2/skln-x/2012 tentang sengketa kewenangan lembaga negara antara presiden, dpr dan bpk*, skripsi, fakultas hukum. Universitas Bung Hatta.
- Ilhami Bisri, 2005. *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1997. *Sistem Administrasi Negara Republik Inonesia*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2017. *Ilmu Perundang-undangan (1)*, Kanisius, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2011. *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nurbeti, 2010, *Hukum Lembaga Negara*, Bung Hatta University Press, Padang.
- Prajudi Admosudirdjo, 1998. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta Timur.
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Surabaya.

Zainudin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha .

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal

C. Sumber Lain

<https://www.kanal.web.id/2016/12/pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp> diakses tanggal 7 oktober 2018 pukul 13.35 WIB

<http://adeliamirhubyazzahra.blogspot.com/2015/10/perizinan-usaha-kewirausahaan>. Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2018 pukul 14.42 WIB

<http://idemotivasibisnis.blogspot.com/2015/09> Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2018 Pukul 20.24 WIB.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/catat-tidak-semua-perizinan-bisa-diurus-melalui-oss>. Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2018 ukul 08.43 WIB.

<https://www.sepengetahuan.co.id/2015/10/5-Pengertian-Globalisasi> Diakses Pada Tanggal 8 Oktober Pukul 10.47 WIB.

[https://m.detik.com/news/berita/.mensos-pelaku-usaha-harus -bantu-sejahterakan-masyarakat](https://m.detik.com/news/berita/.mensos-pelaku-usaha-harus-bantu-sejahterakan-masyarakat), di akses pada tanggal 2 November 2018 pukul 20.00 WIB.

<https://nashiha-sosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada tanggal 26 November 2018, pukul 06.00 WIB.

<https://www.kajianpustaka.com/2013/03/pengertian-bentuk-dan-tujuan-insentif> diakses pada tanggal 7 Desember 2018 pukul 09.30 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga-Negara-Indonesia>, diakses pada tanggal 2 Desember pukul 09.00 WIB.

[http://www.wikiwand.com/id.Lembaga-Pemerintah-Nonkementrian](http://www.wikiwand.com/id/Lembaga-Pemerintah-Nonkementrian) diakses pada tanggal 14 Januari 2019 Pukul 08.00 WIB.

www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses pada tanggal 7 Desember 2018 Pukul 09.37 WIB.